



# News Letter

BIRO UMUM DAN HUMAS  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 01/NL/01/205

Januari 2015



**Kementan Targetkan Swasembada Padi  
Tahun 2016**

**Walaupun Sulit,  
Swasembada Pangan Harus Tercapai**

**Kementan Anggarkan Rp. 5 Miliar  
Untuk Ketersediaan Bibit Sapi Unggul**



# Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian BIRO UMUM DAN HUMAS



03 Kementan Targetkan Swasembada Padi Tahun 2016

04 Walaupun Sulit, Swasembada Pangan Harus Tercapai

06 Kementan Akan Gunakan Pupuk Ciunik Dalam Pencapaian Swasembada Pangan

08 Kementan Gandeng Perguruan Tinggi Untuk Capai Swasembada Pangan

11 Dapat Tambahan Anggaran Rp. 16,9 Triliun Kementan Fokuskan Wujudkan Kedaulatan Pangan

13 Kementan Anggarkan Rp 5 Miliar Untuk Ketersediaan Bibit Sapi Unggul

14 Faktor Penyebab Produksi Padi Indonesia Belum Optimal



•Pengarah: Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian •Penanggung Jawab: Ir. Marihot H. Panggabean, M.si  
 •Penyunting: Agus Sumantri, S.Sos •Pelaksana: Dra. Ria Satiti Irawati, Imam Santoso, SE •Anggota: Alice Raga Dewi, S.Sos, Ir. Rusman,  
 Fajar Rahman, M.S.Ikom, Nia Kurniawatisari, S.Sos •Distribusi: Makmur •Narasumber: Pejabat Kehumasan unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian  
 Ged A Lt.3 Rm 325, Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550 Telp/Fax: 021 7804457



# Kementan Targetkan Swasembada Padi Tahun 2016

*“Kementan menargetkan swasembada lebih cepat dari target Pemerintah, ditargetkan swasembada pangan khusus padi tak sampai tiga tahun dapat diraih. Kementan secara internal menargetkan 2016 untuk padi. Sub-sektor tanaman pangan merupakan sub-sektor penting dan strategis sehingga suksesnya swasembada pangan padi, jagung dan kedelai salah satunya ditentukan oleh kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan”*

Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan serta Swasembada Pangan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Presiden RI yang telah menetapkan agar swasembada padi, jagung dan kedelai yang akan tercapai dalam waktu tiga tahun, tetapi pihak Kementerian Pertanian justru akan berusaha mempercepat pencapaian target swasembada untuk padi sehingga dapat diraih dalam waktu kurang dari tiga tahun. “Walaupun Bapak Presiden menetapkan target swasembada untuk padi, jagung, dan kedelai dapat dicapai dalam tiga tahun mendatang. Kementan menargetkan swasembada lebih cepat dari target tersebut, saya targetkan swasembada pangan pada tahun 2016, Khusus padi tak sampai tiga tahun dapat diraih. Kami secara internal menargetkan 2016 untuk padi” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai pelantikan Dirjen Tanaman Pangan yang baru di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (7/1).

Mentan menegaskan bahwa pelantikan Dirjen Tanaman Pangan dilaksanakan mengingat suksesnya swasembada pangan padi, jagung dan kedelai salah satunya ditentukan oleh kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dengan demikian sub-sektor tanaman pangan merupakan sub-sektor penting dan strategis. “Kepada para petugas seluruh eselon I bekerja secara maksimal dengan komitmen, integritas dan loyalitas yang tinggi, walaupun terdapat pihak yang skeptis meragukan pencapaian swasembada tersebut. Kita harus hadapi pandangan itu dengan semangat kerja dan optimisme yang tinggi,” tegas Mentan



*Mentan, Amran Sulaiman didampingi Sekjen Hari Priono saat melakumkan konferensi pers usai pelantikan Dirjen Tanaman Pangan di Auditorium Gd F Kementan (Dok Humas)*

Mentan menjelaskan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap program swasembada tersebut, pemerintah menambah alokasi anggaran 2015 melalui APBN-P sebesar 16 triliun, serta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian sebesar 4 triliun. Tambahan alokasi anggaran yang besar tersebut belum pernah diperoleh pemerintah sebelumnya. “Untuk mencapai target swasembada pangan tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun terdiri Rp16 triliun melalui APBN Perubahan dan Rp 4 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)” jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan pihak Kementan telah melakukan revisi anggaran Kementerian Pertanian yang mana alokasi untuk bidang-bidang kurang produktif sebesar Rp 4,1 triliun dialihkan ke sektor produktif yang mendukung langsung pencapaian swasembada pangan. Sektor-sektor produktif tersebut yakni pembangunan irigasi, pengadaan benih dan pupuk serta alat dan mesin pertanian. “Sejumlah langkah ditempuh termasuk pengalokasian dana pada sektor-sektor produktif. Selain itu sejumlah langkah strategis, khususnya produktivitas yang sebelumnya lima ton meningkat menjadi tujuh ton, atau dari lima ton ke enam ton dengan biaya produksi yang sama. Kedua, adalah indeks pertanaman yang biasanya petani hanya menanam satu kali, kemudian bisa menanam sampai dua kali juga akan menambah penghasilan petani” ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah menetapkan target swasembada pangan khususnya padi dalam tiga tahun kedepan, bahkan semangat yang ada di internal Kementan bahwa target tersebut akan dapat dicapai kurang dari tiga tahun. Untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait produktifitas, yaitu irigasi, benih, pupuk dan alat mesin pertanian. “Jadi dengan faktor kunci adalah perbaikan irigasi, pengadaan benih, pupuk dan alsintan menjadi fokus dari Kementan maka dalam waktu tiga tahun saya yakin produktifitas akan naik dengan biaya yang sama tapi hasilnya berbeda. Selama ini kerusakan

irigasi, rendahnya penyerapan benih dan pupuk serta minimnya penggunaan alsintan menjadi kunci penghambat swasembada,” jelas Mentan.

Mentan juga menjelaskan Kementeriannya lebih memperhatikan beberapa sektor penting yang selama ini justru menjadi penghambat yakni irigasi. Saat sekarang 52% dari total irigasi rusak di seluruh Indonesia, dan itu akan sangat mempengaruhi tanaman pertanian seluas tiga juta hektar. Mengenai benih, untuk serapan benih pada 2014 hanya mencapai 20%. Yang ke tiga adalah pupuk, ketersediaan pupuk di banyak daerah yang dikunjungi sering terlambat.

Terkait alat dan mesin pertanian, Mentan akan menggunakan untuk penanganan pasca panen yang selalu kehilangan 10,2% dari hasil panen. Dalam mendukung upaya tersebut, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan mesin pemanen padi yang dirancang khusus untuk kondisi tanah sawah Indonesia yaitu combine harvester. Keunggulan mesin itu ialah memiliki gaya tekan yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,13 kg/cm<sup>2</sup> dibandingkan dengan mesin-mesin yang ada di

pasaran sebesar 0,20 kg/cm<sup>2</sup>. “Tingkat kehilangan hasil di pascapanen pertanian mencapai 10,2%, sehingga bisa mengakibatkan kehilangan 1,5-2 juta ton di lapangan. Kalau misalnya kita memberikan combine harvester ke petani bisa mengurangi hal ini dan bila berhasil diantisipasi dengan memanfaatkan dengan mesin harvester, maka diperkirakan 35 juta ton kali 5% kali 1,5 juta ton hingga 2 juta ton produksi padi bisa diselamatkan.” ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Hasil Sembiring Dirjen Tanaman Pangan yang baru dilantik, menyatakan optimis target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai waktunya. Sedangkan upaya yang akan dilakukan pihaknya untuk mencapai target swasembada pangan tersebut, adalah melaksanakan apa yang sudah dicanangkan Mentan.

“Tidak ada program khusus yang kami tetapkan karena apa yang sudah dicanangkan Mentan tentang pembenahan irigasi, benih, pupuk dan alsintan merupakan modal awal swasembada beras maka tinggal melaksanakannya saja” kata Dirjen Tanaman Pangan.

## Walaupun Sulit, Swasembada Pangan Harus Tercapai

*“Terdapat lima faktor yang membuat Indonesia sulit mencapai swasembada pangan ditambah permasalahan menghadang terutama terkait berkurangnya lahan pertanian yang banyak beralih fungsi, serta penyediaan pupuk dan benih yang belum mampu memenuhi permintaan. Sedangkan untuk merealisasikan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, Kementan juga dihadapkan pada setumpuk masalah lainnya. Mulai dari rendahnya produksi sampai minimnya sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian”*

Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai dalam 3 tahun. Pemerintah juga menargetkan bisa memenuhi kebutuhan daging dari produksi dalam negeri, untuk itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar pertemuan dengan para pelaku industri di sektor pertanian.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah permasalahan yang dialami kalangan usaha yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Permasalahan yang dibahas dari mulai sulitnya memperoleh lahan pertanian, penyediaan benih dan pupuk yang masih sulit, hingga peraturan dan perizinan usaha yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan industri pertanian.

“Pemerintah sampai dalam beberapa tahun belakangan ini masih sulit untuk mencapai swasembada pangan. Hal tersebut jelas membuat harga jual produk-produk pangan nasional menjadi tidak stabil. Saya menilai, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah tantangan yang begitu berat. Saya support, apapun untuk mencapai swasembada. Karena tantangan MEA ini betul-betul berat, maka dalam pertemuan ini mari kita carikan solusinya bersama, karena kita sedang punya misi besar mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun. Itu harus dapat dukungan” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat membuka diskusi di Menara Kadin, Jakarta, (9/1).

Di hadapan peserta diskusi, Mentan mengatakan selama dua bulan terakhir, dirinya telah berkeliling Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk mendukung pencapaian



swasembada pangan yang ditargetkan Pemerintah dan dalam 2 bulan tersebut sudah 15 provinsi yang dikunjungi untuk mengetahui masalah. Terdapat lima faktor yang membuat Indonesia sulit mencapai swasembada pangan ditambah permasalahan menghadang terutama terkait berkurangnya lahan pertanian yang banyak beralih fungsi, serta penyediaan pupuk dan benih yang belum mampu memenuhi permintaan. "Setelah saya mengunjungi 15 provinsi 60 kabupaten dalam waktu satu bulan lebih untuk mengecek langsung persoalan yang ada di lapangan, ternyata permasalahan berada di lima faktor irigasi, benih, pupuk, penyuluhan dan alat mesin pertanian. Masalah-masalah pertanian berupa kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih, keterlambatan distribusi pupuk, kekurangan tenaga penyuluh dan minimnya penggunaan alsintan telah mengakibatkan Indonesia kehilangan peluang produksi sebesar 20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pertahun" kata Mentan.



*Mentan Arman Sulaiman melakukan penerangan tentang pencapaian swasembada pangan kepada pelaku industri pertanian saat berdiskusi di gedung Kadin (dok Humas)*

Walaupun terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, Mentan mengaku optimis target swasembadapangan akan tercapai dalam waktu tiga tahun. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup besar, yakni 16,9 triliun rupiah yang merupakan dana pengalihan subsidi BBM. Dana itu akan disalurkan untuk program pembangunan dan perbaikan irigasi, subsidi pupuk, bantuan benih dan membeli alat mesin pertanian, yang menjadi faktor kunci untuk menuju swasembada pangan. "Berdasarkan pengamatan saya di 15 provinsi di Indonesia, ada 52 persen irigasi sudah mengalami kerusakan. Bahkan di provinsi Sumatera Utara malah sudah mencapai 82 persen serta ada juga irigasi yang 20 tahun tidak diperbaiki. Untuk mengatasinya pihak Kementan telah mengalokasikan kurang lebih Rp 2 triliun untuk memperbaiki kerusakan irigasi demi mencapai swasembada pangan Indonesia" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa pada 2014 irigasi rusak di seluruh Indonesia mencapai 52 persen

dengan luas lahan 3,3 juta hektare, Sebagai tahap awal, pada tahun 2015 direncanakan dibangun irigasi di satu juta hektare lahan di 17 provinsi di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong produksi padi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sulawesi Selatan. "Saat ini 52 % irigasi di seluruh Indonesia rusak. Padahal irigasi merupakan faktor kunci dari produksi pertanian. Untuk tahun ini, pembangunan dan perbaikan irigasi akan difokuskan dulu ke 17 provinsi, terutama di Pulau Jawa yang menjadi kantong-kantong produksi padi. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunan dan revitalisasi terhadap seluruh irigasi yang ada di Indonesia," terang Mentan.

Untuk ketersediaan benih, pihak Kementan akan menyediakan 50.000 ton benih/tahun kepada para petani di seluruh Indonesia. Benih tersebut akan disediakan oleh PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri (Persero), dengan skema penunjukan langsung mengingat pada masa sebelumnya untuk menyediakan ribuan ton benih, Kementan membutuhkan waktu panjang karena prosesnya harus ditender.

Dampaknya petani sering telat mendapatkan benih sehingga mengganggu produksi, kini pengadaan pupuk sudah melalui proses penunjukan langsung. Sedangkan terkait permasalahan penyerapan benih, selama setahun penuh di 2014, penyerapan benih nasional sangat kecil dari alokasi yang sudah diberikan pemerintah untuk para petani. Selain itu, masalah lainnya yang kerap terjadi selama ini yaitu seretnya

pencairan dana yang dilakukan pihak perbankan terhadap perusahaan penyalur benih sehingga perusahaan benih hanya mampu menyalurkan benih ke petani dalam jumlah yang minim atau di luar target.

Untuk itu Mentan telah menegur jajaran direksi BUMN yang ditunjuk sebagai penyedia benih subsidi serta pihak BRI dan langsung mendapatkan komitmen BUMN tersebut untuk benar-benar menjalankan amanat negara dalam penyaluran dan penyediaan benih untuk para petani. "Untuk benih, ego sektoral masih mempengaruhi penyerapan cikal bakal produksi pertanian. Selama ini, penyediaan benih hanya mampu memenuhi 20% dari kebutuhan benih rata-rata dalam 1 tahun karena seretnya pencairan dana oleh pihak perbankan tersebut. Kini, perusahaan penyedia benih boleh ditunjuk langsung, benih yang disiapkan antara lain padi, jagung dan kedelai. Dengan terselesainya masalah ini, permasalahan penyediaan benih tahun 2015, tidak perlu

dikhawatirkan lagi dan target swasembada pangan dalam 3 tahun pun dapat tercapai” ujar Mentan.

Selain persoalan irigasi dan benih, ada persoalan lainnya yaitu pupuk yang masih sering terlambat pendistribusiannya dan jumlah penyuluh pertanian, menurut Mentan, tenaga penyuluh pertanian masih kurang, padahal tenaga penyuluh diperlukan oleh Kementerian Pertanian untuk membina keterampilan petaninya. Petani membutuhkan penyuluh sebanyak 70 ribu, tapi yang ada sekarang 20 ribu orang, sedangkan pihak Kementan kesulitan merekrut tenaga baru.

Kondisi tersebut karena ada moratorium pegawai negeri sipil (PNS). Untuk mengantisipasi kekurangan penyuluh pertanian dalam upaya swasembada pangan, pihak Kementan telah melakukan kesepakatan dengan TNI Angkatan Darat. Ada 50 ribu Bintara Pembina Desa dari TNI Angkatan Darat yang akan dikerahkan sebagai tenaga penyuluh pertanian di sentra-sentra produksi pertanian. Setelah disepakati bersama, tugas selanjutnya yakni melatih para tentara untuk menjadi penyuluh pertanian. “Sekarang kami membutuhkan 70 ribu orang tenaga penyuluh, namun yang tersedia hanya 20 ribu orang saja. Penyuluh pertanian, sangat penting mengingat salah satu masalah pertanian saat ini adalah kurangnya keterampilan petani untuk menggunakan metode-metode baru pertanian yang lebih efisien. TNI terpaksa dikerahkan karena pemerintah sudah membatasi perekrutan PNS. TNI bisa diajak kerja sama untuk menjadi ‘pasukan pertanian’ untuk memenuhi tenaga penyuluh, saya telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan siap mengerahkan 50 ribu Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bahkan, TNI siap

mendukung swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah. Dengan begitu, masalah tenaga penyuluh pertanian selesai. Tinggal kami latih Babinsa-nya,” kata Mentan.

Mentan menambahkan untuk merealisasikan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, Kementerian Pertanian juga dihadapkan pada setumpuk masalah lainnya. Mulai dari rendahnya produksi sampai minimnya sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Salah satunya makin sedikitnya jumlah petani di Indonesia. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah petani dalam satu dekade terakhir. “Pada 2003, rumah tangga yang menanam padi mencapai 14,2 juta rumah tangga, sementara pada 2013 turun menjadi 14,1 juta. Usaha tanaman kedelai menurun dari satu juta (2003) menjadi hanya 700.000 rumah tangga. Untuk usaha tanaman jagung juga terjadi penurunan dari 6,4 juta di 2003 menjadi 5,1 juta di 2013. Padahal kita tahu 10 tahun terakhir ada penurunan rumah tangga petani 31 juta jadi 26 juta. Kurang lebih 5 juta kali 4 berarti 20 juta orang tinggalkan pertanian, ini mengkuatirkan,” kata Mentan.

Dalam menyikapi kondisi tersebut Mentan mengaku mempunyai solusi yaitu dengan memaksimalkan penggunaan mesin-mesin pertanian. Dengan kata lain, untuk meningkatkan produksi pertanian, Kementerian Pertanian akan membeli alat mesin pertanian (alsintan) dan tenaga petani yang berkurang akan diganti dengan tenaga mesin. Alat mesin pertanian diperlukan karena terjadi penurunan rumah tangga petani dari 31 juta menjadi 26 juta.

## Kementan Akan Gunakan Pupuk Ciunik Dalam Pencapaian Swasembada Pangan

*“Penggunaan pupuk yang disebut ciunik telah berhasil meningkatkan produktivitas padi menjadi 9,1 ton per hektar. Selisih empat ton jika dibandingkan dengan rata-rata produksi padi nasional sebesar 5,1 ton per hektar. Biaya penggunaan pupuk Ciunik pun lebih murah ketimbang pupuk organik. Dengan pengembangan potensi lokal di daerah seperti pupuk Ciunik dapat mendorong swasembada pangan di Indonesia”*

Pemerintah RI telah bertekad akan mewujudkan swasembada beras dalam tiga tahun mendatang. Dalam merealisasikan hal itu, pihak Kementerian Pertanian terus mendorong daerah lumbung padi nasional dengan membantu faktor kunci peningkatan produktivitas padi, yakni pemberian pupuk di daerah berpotensi seperti Sukoharjo. “Daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, memiliki produktivitas rata-rata padi jauh di atas rata-rata nasional, yaitu mencapai 9,1 ton/Ha, sementara rata-rata nasional hanya 5,1 ton/Ha. Usut punya usut ternyata, petani Sukoharjo ternyata memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan produksi pangannya” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Sukoharjo provinsi Jawa Tengah (26/1)

Mentan mengungkapkan Sukoharjo adalah daerah yang berhasil meningkatkan produktivitas padi melalui pupuk unik hasil kreasi anak bangsa. Pupuk yang diberi nama ciunik tersebut menarik perhatian dirinya, karena berhasil meningkatkan produktivitas padi Sukoharjo hampir dua kali lipat. Peningkatan produktivitas padi di Sukoharjo dengan menggunakan pupuk ciunik berhasil menjadikan produksi padi menjadi 9,1 ton per hektare (ha). Selisih empat ton jika dibandingkan dengan rata-rata produksi padi nasional sebesar 5,1 ton per ha. “Saya akui, tertarik dengan cara unik warga Kabupaten Sukoharjo dalam mengembangkan produksi pertaniannya. Pasalnya, para petani Sukoharjo kini mengandalkan limbah ciu sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Ciu sendiri merupakan sari

tebu yang biasa digunakan untuk membuat alkohol, sehingga jika diminum dapat berefek memabukkan. Namun petani Sukoharjo justru mengalihkan hasil limbah ciu tersebut untuk digarap kembali sebagai pupuk tanah. Jadi pupuk ciunik itu untuk mengemburkan tanah, bukan untuk padi. Jadi kalau tanah sudah gembur, produksi padi semakin baik” ungkap Mentan.



*Pupuk Ciunik yang merupakan hasil karya daerah Sukoharjo yang dapat meningkatkan produktivitas padi (Dok Humas)*

Mentan menyatakan penggunaan pupuk yang disebut ciunik telah berhasil meningkatkan produktivitas padi menjadi 9,1 ton per hektar. Selisih empat ton jika dibandingkan dengan rata-rata produksi padi nasional sebesar 5,1 ton per hektar. Biaya penggunaan pupuk ciunik pun lebih murah ketimbang pupuk organik, Karena keunggulan ciunik tersebut, pihak Kementerian menjanjikan akan membantu pemberian pupuk ciunik kepada pertanian Sukoharjo sebanyak 5.000 hektar. Artinya, pemerintah siap menggelontorkan Rp 9 miliar dalam penyediaan pupuk ciunik untuk Kabupaten Sukoharjo saja. Pihak Kementerian tertarik untuk menggunakan pupuk organik tersebut di daerah lumbung padi nasional lainnya. Pasalnya, dengan pemanfaatan ciunik ini, dirinya optimistis Indonesia akan dapat swasembada beras yang ditargetkan terealisasi dalam kurun waktu tiga tahun.

“Dari total lahan pertanian Sukoharjo sebanyak 23.300 ha, 10-15 persen di antaranya menggunakan pupuk ciunik. Ini sangat bagus, produksi beras di Sukoharjo melesat hampir dua kali lipat dengan menggunakan pupuk ciunik. Kita harus apresiasi peningkatan tersebut. Dengan menggunakan ciunik,

hasil panen lebih besar. Menurut petanipun juga biayanya lebih murah daripada penggunaan pupuk organik, sekitar Rp1,8 juta per hektar. Kami pun akan mencoba pengembangan pupuk ciunik ini ke wilayah lain di Indonesia, karena selisihnya besar sekitar 4 juta ton per hektar dengan menggunakan ciunik. Kalau selisih itu disebar dan dikembangkan ke 11 juta ha, berarti sudah empat juta dan sudah swasembada. Ini baru dari faktor pupuk. Kita mimpi swasembada, dalam tahun ke depan bisa terealisasi. Pokoknya kami akan terus usahakan Indonesia bisa swasembada beras.” kata Mentan.

Mentan merasa yakin dengan pengembangan potensi lokal di daerah seperti pupuk Ciunik dapat mendorong swasembada pangan di Indonesia. “Realisasi swasembada dapat diraih dengan kebersamaan seluruh stakeholder yang bergerak melepaskan ego sektoral. Setiap wilayah punya keunggulan masing-masing. Maka itu, potensi dan keunggulan potensi daerah tersebut harus diangkat dan didukung, seperti di Sukoharjo ini. Luas lahan sawah di Indonesia sebesar 7 juta Ha ditambah potensi lokal pupuk sehingga potensi seluruhnya memproduksi 9 ton maka hasilnya adalah 63 juta ton, jika dikalikan dua kali panen hasilnya 126 juta ton, padahal Indonesia hanya butuh 60 juta ton. 66 juta ton lebihnya kita bisa ekspor” jelas Mentan.



Selain bantuan untuk pengembangan pupuk ciunik, Kementerian juga memberikan bantuan berupa 130 unit alsintan, pupuk dan benih padi gratis untuk 1.000 hektare lahan, sarana produksi jagung gratis untuk 3.000 hektare lahan, serta tiga ton benih kedelai unggulan untuk 1.000 hektare lahan. Dalam kesempatan yang sama Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya juga menjelaskan bahwa daerah Sukoharjo sudah mengembangkan dan melaksanakan pemakaian pupuk organik Ciunik guna mendongkrak hasil beras di lahan pertanian daerahnya. Pupuk yang diberi nama ciunik tersebut dapat menghasilkan padi sebanyak 9,1 ton per hektare (ha).

Padahal sebelumnya, produktivitas padi

daerahnya hanya mampu hasilkan sekira 5 ton per ha.

Keunggulan dari pupuk Ciunik unggulan daerahnya adalah pupuk tersebut dapat menggemburkan tanah yang sebelumnya mengeras akibat penggunaan pupuk non organik yang terus menerus.

Semenjak saat itu, panen padi di Sukoharjo selalu melimpah. “ jelas Bupati Sukoharjo. Bupati Sukoharjo menerangkan saat sekarang dari total lahan pertanian Sukoharjo sebanyak 23.300 ha, 10-15 persen di antaranya telah memakai pupuk ciunik karena penggunaan pupuk tersebut jauh lebih murah ketimbang menggunakan pupuk yang biasanya.



*Mentan Arman Sulaiman berjabat tangan dengan rektor IPB Herry Suhardiyanto sebagai tanda kesepakatan kerjasama antara Kementan dan IPB dalam rangka mendukung program swasembada pangan (Dok Humas)*

Kementan bertekad swasembada pangan, terutama beras harus dapat terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI. Tetapi keberhasilan swasembada pangan perlu dukungan semua pihak. Oleh karenanya, Kementerian Pertanian dan Institut Pertanian Bogor sepakat menjalin kerjasama. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Pertanian dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka mendukung program swasembada pangan. Dalam penandatanganan MoU tersebut pihak Kementerian Pertanian RI diwakili Menteri Pertanian Amran Sulaiman sedangkan institut Pertanian Bogor diwakili oleh Rektor IPB, Herry Suhardiyanto.

“Kementan melakukan kerjasama dengan IPB terkait pencapaian swasembada pangan dalam hal ini padi, jagung dan kedelai yang di programkan oleh pemerintah bisa tercapai dalam waktu kurang dari 3 tahun, Kerja sama ini penting dilakukan untuk membagi hasil riset IPB dalam mensukseskan program swasembada pangan. Hasil riset tersebut terutama benih, irigasi dan alsintan, “ kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai penandatanganan MoU dengan IPB,

“Pada awalnya limbah ciu yang dihasilkan dari penggilingan tebu tersebut tak dilirik warganya karena memiliki aroma yang kurang sedap. Maka solusinya limbah ciu itu kita buat pupuk organik. Limbah ciu itu sendiri yaitu tetes tebu yang diambil sarinya untuk alkohol, dan bekal limbahnya itu yang kita garap lagi untuk pupuk organik peneliti asal Jakarta memanfaatkan limbah ciu tersebut dan menggunakannya sebagai penggembur tanah di pertanian padi Sukoharjo, Memakai ciunik juga lebih irit dari pemakaian pupuk anorganik, untuk satu hektare lahan hanya memerlukan biaya sekitar Rp 1,8 juta “ terang Bupati Sukoharjo .

## Kementan Gandeng Perguruan Tinggi Untuk Capai Swasembada Pangan

*“Kementan menggandeng Perguruan Tinggi untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan. Peran Perguruan Tinggi sangat membantu kerja Kementan untuk mencapai swasembada pangan. Dengan bantuan Perguruan Tinggi dalam menjalankan program-program Kementan, maka dalam tiga tahun mendatang swasembada pangan di Indonesia dapat terwujud”*

di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta (16/1).

Mentan menerangkan Kementan akan menggandeng perguruan tinggi untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan dimana sebelumnya Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta juga telah memberikan dukungan terhadap pengembangan kedelai dengan produktivitas tanaman mencapai tiga ton per hektare. Dirinya menyambut baik kerjasama antara Kementan dengan IPB. Peran IPB sangat membantu kerja Kementan untuk mencapai swasembada pangan. Dengan bantuan IPB dalam menjalankan program-program Kementan, maka dalam tiga tahun mendatang swasembada pangan di Indonesia dapat terwujud.

“Untuk IPB, akan difokuskan terhadap pengembangan benih padi sedangkan UGM pada kedelai. Kebijakan apa yang diperlukan perguruan tinggi untuk mendukung swasembada pangan ini, kami akan siapkan, dan Kementan siap menggunakan benih padi hasil penelitian IPB sebagai upaya percepatan pencapaian swasembada pangan 2017. Saya berharap bahwa nantinya program-program yang akan dikeluarkan Kementan dapat

tercapai dengan bantuan dari peran dosen dan mahasiswa IPB yang ikut serta sebagai penyuluh pertanian.”terang Mentan.

Menurut Mentan kerjasama antara pihak Kementan dengan IPB nantinya dalam bentuk berupa dukungan penyediaan benih padi unggul dan alat-alat pertanian lainnya dan pendampingan penyuluh pertanian di daerah-daerah produksi padi di seluruh Indonesia. Pihak Kementan meminta IPB untuk mengeluarkan benih padi varietas unggul baru yang bisa ditanam petani. IPB telah memproduksi varietas unggul baru dengan produksi yang rata-rata bisa meningkat hingga 50 persen.

“IPB telah meriset untuk menopang dan mendukung tercapainya swasembada pangan. Ini perlu dicatat, ada benih baru dari IPB yang produksinya mencapai 12,5 ton per hektare. Mudah-mudahan benih tersebut sudah mulai bisa ditanam, Benih varietas baru unggul tersebut berhasil mencapai produksi 10 ton per hektare. Sementara itu, sekarang produksi padi rata-rata nasional adalah 5 ton. Ini berarti, tiap hektare ada peningkatan 5 ton. Jadi jika ada 5 juta hektare, peningkatannya mencapai 25 juta ton.

Mentan memaparkan IPB telah sepakat untuk membagi hasil risetnya untuk pengembangan komoditas pangan guna mendukung pencapaian swasembada pangan. Salah satu hasil penelitian IPB yang diterima Kementan adalah dua varietas unggul baru (VUB) IPB 3S dan IPB 4S yang potensi hasil panennya maksimal. IPB berupaya melakukan percepatan diseminasi varietas tersebut kepada petani dengan bahasa yang mudah dicerna oleh petani melalui penyuluhan. “Apapun jenis varietas unggul baru yang dihasilkan IPB untuk petani, hasilnya diharapkan akan menguntungkan bagi petani, saya akan mendorong perguruan tinggi lainnya dapat mengikuti langkah-langkah IPB untuk menghasilkan inovasi lain dalam upaya percepatan swasembada pangan. Selain benih, saya mengharapkan IPB bisa membagi teknologinya dalam menciptakan alat mesin pertanian.”papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa guna mencapai swasembada pangan pada 2018/2019 mendatang, Kementerian Pertanian sejak November 2014 lalu telah membidik 5 faktor produksi untuk ditenahi. Lima faktor yang ditingkatkan itu adalah perbaikan irigasi, pengadaan dan peningkatan produksi benih serta pupuk, pendistribusian pupuk yang tepat waktu, khususnya 17 provinsi yang menjadi lumbung padi dan jagung, serta penambahan tenaga penyuluhan dengan melibatkan sejumlah stake holder terkait, yaitu diantaranya institusi pendidikan serta TNI AD dan terakhir adalah pengadaan alat sistem pertanian. Kementan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi program swasembada pangan sekaligus mempertegas dan mengklarifikasi peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dalam upaya pencapaian swasembada pangan, Kementan sudah memfokuskan pada pengidentifikasi permasalahan yang mungkin menjadi hambatan dalam pencapaian swasembada pangan nanti, misalnya masalah benih, pupuk, irigasi, alsintan, tenaga kerja dan koordinasi dengan instansi lain, Salah satu upaya dalam mengatasi hal itu dalam hal ini Kementerian Pertanian telah menyediakan dana untuk program percepatan optimasi lahan yang meliputi penyediaan benih, pupuk dan alsintan, Pada tahun 2015 saya berharap Kementan mendapat tambahan anggaran APBNP sebesar Rp. 16,918 triliun yang difokuskan untuk program swasembada padi, jagung dan kedelai.” jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan Anggaran APBN murni tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp 15,87 Triliun dan telah dilakukan langkah refocusing serta penghematan anggaran terutama perjalanan dinas untuk mendukung program swasembada pangan sebesar Rp3,9 Triliun dan tambahan anggaran dari APBN-P sebesar Rp 16,918 Triliun yang akan difokuskan untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai dengan target kurang dari 3 tahun. ”Pemerintah, telah merencanakan 1000 desa atau kelurahan yang mampu menyediakan benih untuk melayani kebutuhan petani setempat dan desa sekitarnya. Guna mendukung program swasembada pangan ini, pada tahun ini APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp 15,87 triliun. Ditambah dana sebesar Rp 3,9 triliun berasal dari penghematan anggaran perjalanan dinas. Insya Allah pada tahun ini juga akan mendapat tambahan anggaran APBN-P sebesar Rp16.918 triliun yang difokuskan untuk mendukung program swasembada padi, jagung, dan kedelai,” ungkap Mentan.

Selain merencanakan 1000 desa untuk penyediaan benih, Mentan menerangkan pihak Kementan juga menargetkan produksi gabah kering giling atau GKG tahun 2015 mencapai 73 ton. Jumlah itu meningkat 3 juta ton dibandingkan realisasi produksi di 2014 sebesar 70 juta ton. Dirinya optimistis produksi 73 juta ton GKG tahun ini bisa tercapai. Bahkan secara bertahap produksi padi terus meningkat dan tidak perlu impor. Dengan total luas areal tanam yang ada saat sekarang sebesar 7,1 juta hektar dikalikan masa panen 2 kali setahun produksi padi Indonesia ke depan cukup berlimpah.

“Swasembada membutuhkan 73 juta ton GKG, itu sudah cukup, salah satu hal yang membuat saya optimistis adalah penemuan varietas bibit unggul padi oleh Institut Pertanian Bogor IPB telah mampu memproduksi benih varietas unggul yaitu IPB 3 S dan IPB 4 S dengan produksi masing-masing 11,5 ton/hektar/musim dan 10,6 ton/hektar/musim. Lahan kita sekitar 7,1 juta hektar. produksinya tidak harus 10 ton/hektar, cukup 8 ton/hektar saja dikalikan 7 juta hektar itu 56 juta ton. Kalau dikalikan 2 jadi 110 juta ton. Itulah potensi lahan di Indonesia manakala menggunakan benih unggul. Walaupun lahan kita cukup tetapi alih



fungsi lahan harus kita tekan.” kata Mentan.

Mentan juga mengungkapkan rasa optimismenya semakin bertambah ketika IPB menawarkan teknologi dan sistem modernisasi pola tanam padi bersamaan pengajuan kenaikan jumlah anggaran Kementan sebesar Rp 16,9 triliun kepada Presiden guna mendukung program swasembada pangan. Tak hanya sekedar swasembada beras,

dirinya bercita-cita agar Indonesia bisa menjadi eksportir beras dalam 4 tahun ke depan.

Ekspor beras akan dilakukan setelah swasembada beras tercapai. Swasembada beras sendiri ditargetkan tercapai di 2018. Agar bisa swasembada, Indonesia harus bisa memproduksi paling tidak 73 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 43,8 juta ton beras. Ekspor beras akan dilakukan bila produksi GKG sudah mencapai 84 juta ton. Produksi sebesar itu ditargetkan tercapai 2019. Setelah swasembada pada 3 tahun, atau 4 tahun bisa tercapai dengan produksi 84 juta ton GKG maka Indonesia bisa ekspor. Uni Eropa dan Amerika Serikat akan dijadikan sebagai tujuan ekspor bila produksi beras Indonesia sudah melebihi kebutuhan nasional, karena Pasar Eropa dan Amerika semakin terbuka untuk padi organik. “Saya optimis Indonesia bukan hanya bisa swasembada tapi juga menjadi eksportir beras karena adanya berbagai varietas unggul padi hasil penelitian para ahli di Indonesia.

Institut Pertanian Bogor misalnya, telah mengembangkan benih padi dengan produktivitas 12,5 ton/Ha. Ada hasil riset untuk menopang swasembada. Ada benih baru padi yang bisa produksi 12,5 ton/Ha. Saat ini, rata-rata produktivitas tanaman padi di Indonesia masih 5,1 ton/Ha. Bila varietas unggul hasil penelitian IPB dapat dikembangkan lebih lanjut dan digunakan secara masif, produksi padi bisa naik sampai 2 kali lipat tanpa perluasan areal lahan. Kalau ini berhasil, maka dapat dikatakan di lapangan ada benih 10 ton/Ha saja, maka peningkatannya 100 persen. Itu baru dari benih. Selain menggunakan benih unggul, produksi padi juga akan ditingkatkan dengan perbaikan irigasi dan penggunaan alat-alat mesin pertanian yang lebih modern. Apabila 52 persen irigasi di seluruh Indonesia yang dalam keadaan rusak telah diperbaiki ditambah dengan penggunaan alat mesin pertanian modern



mesin pertanian. Maka hal itu semakin meyakinkan swasembada tercapai pada 3 tahun ke depan” ungkap Mentan.

Mentan menerangkan swasembada pangan dibutuhkan 73 juta ton gabah kering giling dan untuk bisa mengekspor beras dibutuhkan 84 juta ton maka lahan pertanian di Indonesia juga harus mencukupi sehingga alih fungsi lahan harus ditekan.

“Alih fungsi lahan pertanian perlu juga diupayakan untuk ditekan agar produksi pangan tidak terganggu. Alih fungsi lahan harus kita tekan. Tak hanya mencegah alih fungsi lahan, areal lahan pertanian juga akan ditambah 1 juta Ha dalam 5 tahun ke depan, 500 ribu Ha untuk tebu, dan 500 ribu Ha untuk tanaman pangan lainnya termasuk padi” terang Mentan.

Terkait lahan untuk produksi pangan, Mentan menyebutkan pihak Kementan sedang menyiapkan kawasan terpadu produksi pangan atau food estate. Pembangunan food estate akan dilakukan pada 2016 di Kalimantan untuk mendukung program swasembada 2017. Untuk membangun food estate, Kementan bekerjasama dengan dua kementerian lain yaitu Kementerian Kehutanan-Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria-Tata Ruang. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyiapkan 350.000 hektar kawasan hutan di Kalimantan kepada Kementan untuk dikelola. Pembangunan food estate bukan program baru, karena pada pemerintahan sebelumnya, program serupa sempat digagas di Merauke, Papua dan Kalimantan di Ketapang Kalbar dan Bulungan Kaltim, namun gagal.

“Ke depan saya ingin kita membuat food estate di Kalimantan. Kita mulai dan kita bangun di Kalimantan tahun 2016 sesuai dengan rencana kita, Secara keseluruhan saya menginginkan luas areal food estate yang nanti dibangun minimal 500.000 hektar. Sekarang sudah ada 350.000 hektar, kita kerjakan 10.000-50.000 hektar dulu Di tempat itu akan dikelola penanaman berbagai macam produk pangan dan peternakan seperti jagung, kedelai, padi dan peternakan sapi. Kami butuh 500.000 hektar. Food estate ini lain jadi kami butuh tim yang lain, untuk itu saya meminta pengelolaan food estate nantinya tidak hanya dipegang oleh Kementan tetapi juga melibatkan IPB Mengenai anggaran yang dibutuhkan saya belum berani menyebutkan, karena menunggu alokasi APBN 2016. “imbuh Mentan.

karena diperkirakan ke depan IPB telah menciptakan alat

# Dapat Tambahan Anggaran Rp. 16,9 Triliun Kementan Fokuskan Wujudkan Kedaulatan Pangan

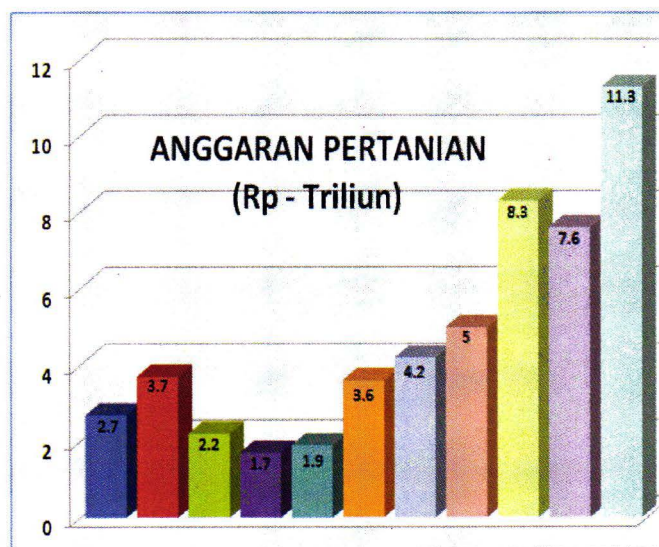
*“Dengan tambahan anggaran sebesar Rp16,9 triliun Kementan pada tahun 2015 akan fokus mewujudkan kedaulatan pangan secara mandiri, meningkatkan produksi pangan dalam negeri dengan memprioritaskan enam hal, yaitu irigasi, pupuk, benih, alsintan, operasional penyuluhan, dan gertak birahi IB”*

Pemerintah RI menargetkan pencapaian swasembada pangan yaitu padi, jagung, kedelai, gula, dan daging dalam periode tiga hingga empat tahun ke depan. Dengan demikian Kementerian Pertanian akan dapat tambahan anggaran sebesar Rp16,9 triliun dalam APBN-P 2015. Dengan anggaran sebelumnya Rp 55,56 triliun, maka total anggarannya menjadi Rp 72,46 triliun. Penambahan Rp 16,9 triliun akan digunakan untuk refocusing swasembada pangan pada 5 komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging.” Di tahun 2015 Kementan akan fokus mewujudkan kedaulatan pangan secara mandiri, meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dan mensejahterakan petani serta nelayan. Kita dalam waktu dekat ini akan memperluas ruang pertanian, dan sektor irigasi yang saat ini masih kurang,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat Kerja Komisi IV di DPR, Senayan, Jakarta (19/1).

Kepada DPR, Mentan menjelaskan tujuan swasembada padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kedelai untuk pemenuhan kebutuhan pengrajin tempe dan tahu dan industri lainnya. Jagung untuk memperkaya pangan dan pemenuhan kebutuhan pakan dan industri lainnya. Daging, untuk memenuhi defisit daging dan konsumsi nasional, dan gula untuk kebutuhan nasional. “Dari tambahan anggaran sebesar Rp16,9 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 72,46 triliun, Kementan akan memprioritaskan enam hal. Anggaran tersebut kami butuhkan untuk irigasi, pupuk, benih, alsintan, operasional penyuluhan, dan gertak birahi IB. Enam hal ini jadi prioritas,” jelas Mentan.

Mentan memaparkan bahwa fenomena pergeseran musim yang terjadi di berbagai daerah bakal berimplikasi kepada ketersediaan pangan sehingga dapat mengganggu target swasembada bila tidak dilakukan upaya percepatan. Untuk itu, diperlukan upaya khusus guna mempercepat ketersediaan pangan sesuai arahan Presiden untuk terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan visi misi yang terdapat di dalam Nawa Cita. Pelaksanaan program percepatan itu akan didukung dari anggaran dana kontingensi 2014 yang

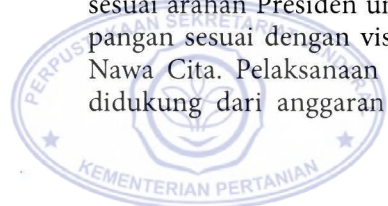
berasal dari dan pos stabilisasi pangan hasil refocusing Kementan 2014. “Dalam musim tanam Oktober 2014 sampai Maret 2015 telah terjadi pergeseran musim sehingga terjadi penurunan masa tanam yang bisa berimplikasi kepada ketersediaan pangan. Faktor kunci untuk mengatasi masalah percepatan ketersediaan pangan antara lain adalah ketersediaan jaringan irigasi dan lahan yang memadai di daerah. Penggunaan dana kontingensi, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, rencananya akan disediakan antara lain untuk percepatan optimalisasi lahan di sebanyak 13 provinsi di Tanah Air” papar Mentan.



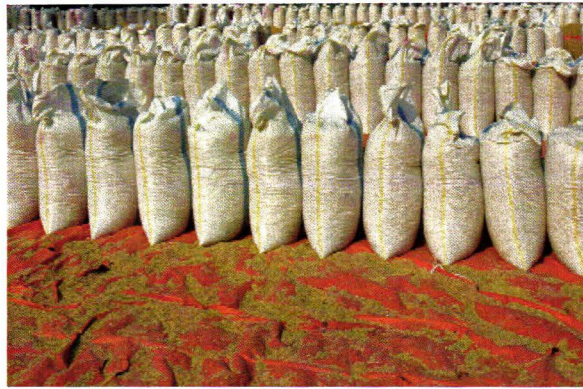
*Penambahan anggaran pertanian oleh pemerintah yang akan digunakan Kementan dalam pencapaian target swasembada pangan (Dok Humas)*

Mentan mengungkapkan tambahan anggaran tersebut nantinya untuk perbaikan irigasi karena kerusakan irigasi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan yaitu mencapai 52 persen atau sekitar 3,3 juta hektar lahan total 7,3 juta hektar. Dirinya telah mengecek di lapangan, ke-18 provinsi, 60 kabupaten. Bahkan kerusakan irigasi di Sumatera Utara mencapai 80%, dan di Aceh 60%. Rata-rata kerusakan irigasi di seluruh Sumatera mencapai 50%. Hal itulah yang menyebabkan produksi padi menurun. Kementan menargetkan produksi padi pada 2015 bisa mencapai 73 juta ton. Tahun 2014 lalu produksi padi hanya mencapai 70 juta ton, itu pun sudah berkurang satu juta ton dibanding 2013. “Untuk mencapai target swasembada padi pada 2017 mendatang, rehabilitasi jaringan irigasi sangat penting karena kerusakan irigasi tersebut berkontribusi terhadap penurunan produksi padi hingga 4,5 juta ton per tahun. Irigasi mengalami kerusakan, sebab tidak dilakukan rehabilitasi selama 20 bahkan hingga 30 tahun lamanya. Sehingga komponen utama APBN perubahan 2015, yakni rehabilitasi jaringan irigasi rencananya sekitar 1 juta hektar per tahun selama 3 tahun. Selain itu optimasi lahan, bantuan benih, pupuk, dan alsintan,” ungkap Mentan.

Menanggapi pertanyaan mengapa Kementan bekerja



sama dengan Kemen PU dalam membangun irigasi, Mentan menuturkan bahwa pihak Kementerian PU membangun primer dan sekunder, sedangkan Kementan membangun irigasi tersier atau irigasi paling akhir. Kerja sama tersebut agar irigasi yang dibangun bisa melewati titik-titik persawahan sehingga air yang mengalir tepat sasaran.



“Pada 2014 irigasi rusak di seluruh Indonesia mencapai 52 persen dengan luas lahan 3,3 juta hektare. Untuk rehabilitasi jaringan irigasi Kementan melakukan koordinasi bersama Kemenpupera agar alokasi anggaran menjadi maksimal, Kementan telah mengalokasikan kurang lebih Rp2 triliun untuk memperbaiki kerusakan irigasi, demi mencapai swasembada pangan Indonesia” tutur Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan Kementan menargetkan akan merehabilitasi jaringan irigasi satu juta hektar per tahun selama tiga tahun. Sekarang 52 persen irigasi rusak sehingga berkontribusi menurunkan produksi 4,5 juta ton per tahun. Sebagai tahap awal, pada tahun 2015 ini ia berencana membangun irigasi di satu juta hektare lahan di 17 provinsi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong produksi padi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sulawesi Selatan. “Akibat selama 20 tahun bahkan 30 tahun tidak diperbaiki, maka tercatat ada 7,3 juta hektar sawah menggunakan irigasi, 3,3 juta hektar diantaranya rusak. Lokasinya ada di 18 provinsi dan 60 kabupaten. Bahkan rata-rata kerusakan di Sumatera mencapai 50 persen dengan Sumatera Utara 80 persen dan Nanggroe Aceh Darussalam 60 persen. Tahun 2015 target sarasannya ialah dapat terbangun irigasi baru 1 juta hektar, terehabilitasi 3,3 juta hektar di 13 sentra produksi beras nasional sebesar Rp 2 triliun. Yang paling utama Jawa, Sumut, Medan, Sulsel, Aceh” terang Mentan.

Menurut Mentan selain untuk perbaikan irigasi, tambahan anggaran tersebut digunakan dalam penyediaan benih mengingat pada tahun 2014, serapan benih hanya 20 persen. Benih yang ada di lapangan saat sekarang hanya sekitar 5 persen yang termasuk unggul padahal sudah ada benih padi yang dapat menghasilkan produksi 10 ton per ha dari rata-rata produksi padi di Indonesia 5,1 ton per hektar (ha). “Kalau kita menggunakan 20 persen saja benih yang produksinya 10 ton per ha berarti produksinya bisa dua kali lipat. Ini merupakan tantangan khusus bagi penyuluh pertanian tetapi jumlah penyuluh juga kurang, hanya 20.000 pegawai negeri, THL 20.000, sedangkan kita butuhnya 70.000. Solusi yang ditempuh dengan melibatkan mahasiswa untuk pengawasan irigasi dan benih, pupuk serta pendampingan dari TNI, babinsa yang ada di desa-desa” ujar Mentan.

penggunaan alat mesin pertanian tidak kalah pentingnya seperti irigasi, benih, pupuk, dan penyuluh. Sebab, alsintan inilah yang bisa mendorong produktivitas, sehingga kesejahteraan petani pun meningkat. “Saat ini penggunaan alsintan di pertanian di Indonesia hanya 10 persen dari penggunaan alsintan di Thailand. Tidak adanya alsintan

ini menyebabkan kita kehilangan potensi produksi 20 juta ton per tahun, Atas dasar itu, Kementerian Pertanian akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk memperbanyak alsintan” tegas Mentan

Mentan juga menuturkan dalam kurun waktu 10 tahun terjadi penurunan 500.000 rumah tangga tani per tahun. Dari 31 juta rumah tangga petani saat sekarang tinggal 26 juta. Penyebabnya, penghasilan hanya Rp 200.000 per bulan per orang karena hanya mengelola lahan seluas 0,3 ha. “Ada dua cara untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga tani yaitu meningkatkan indeks pertanaman. Saat ini indeks pertanaman secara nasional di level 1,68. Kalau ingin mencapai swasembada maka indeks pertanaman setidaknya harus 3,3. Selanjutnya produktivitas pertanian harus ditingkatkan yaitu penggunaan benih unggul, serta penggunaan alsintan yang cukup hingga 60 ribu unit” tutur Mentan.

Pada kesempatan tersebut Mentan juga menjelaskan masalah daging Kementan mempunyai program yaitu Gertak birahi IB. Program tersebut merupakan inseminasi buatan 2 juta ekor sapi. Dimana sapi yang menjadi induk harus melahirkan dua kali agar tingkat kematian hanya 10 persen. Ditargetkan satu juta ekor sapi per tahun agar mendapatkan 1,6 juta ekor sapi hingga tiga sampai empat tahun. “Hanya saja perlu diperhatikan tidak sembarang sapi betina yang di-inject karena kalau masih perawan tidak bisa, berisiko kematian bagi induknya. Berdasar pengalaman, 40 persen sapi mati karena belum pernah melahirkan. Stok saat ini 8 juta. Kemudian indukkannya kami harap beli 30.000 ekor dan sapi bibit 1.200 ekor, Dengan begitu pemerintah menargetkan produksi padi 2015 mencapai 73 juta ton, meningkat dari 2014 yang mencapai 70 juta ton” ujar Mentan.

Mentan menambahkan untuk komoditi perkebunan, Kementan melakukan kegiatan peningkatan produksi gula juga akan mengurangi separuh impor dari total kebutuhan lima juta ton. Ada rintisan kebun tebu 6.700 ha (KBD-0), 5.300 pull tractor, serta 500 unit pompa air. Sedangkan kakao juga akan dianggarkan Rp1,2 triliun. Indonesia yang pernah berada di tingkat dua menurun menjadi tiga dalam memproduksi kakao. Di Batam impor kakao 400 kontainer per bulan, moga-moga ke depan bisa dikurangi dengan peningkatan produksi dan rehabilitasi tanaman kakao.

# Kementan Anggarkan Rp 5 Miliar Untuk Ketersediaan Bibit Sapi Unggul



Mentan Arman Sulaiaman saat berkunjung ke Balai Embrio Ternak Cipelang di Kabupaten Bogor Jawa Barat (Dok Humas)

*“Untuk mendukung ketersediaan bibit sapi unggul di Indonesia Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar dalam mengembangkan Balai Embrio Ternak di sembilan wilayah Indonesia. Dengan penambahan jumlah Balai Embrio Ternak tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelahiran sapi kembar hingga 500 ribu ekor”*

Untuk mendukung ketersediaan bibit sapi unggul sebagai upaya mencapai swasembada sapi, Kementerian Pertanian akan mengembangkan Balai Embrio Ternak (BET) di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanianpun siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar dalam mengembangkan sembilan Balai Embrio Ternak (BET) yang ada di Indonesia, dengan harapan bisa memproduksi embrio sapi kembar. “Kami mendorong semua Balai Embrio Ternak yang ada agar produksi embrio ditingkatkan untuk mendukung ketersediaan bibit sapi unggul di Indonesia. Kamipun siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk mengembangkan Balai Embrio Ternak di sembilan wilayah Indonesia. Diharapkan tahun ini sembilan balai embrio ternak tersebut sudah siap beroperasi” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela kunjungan ke Balai Embrio Ternak Cipelang, Kabupaten Bogor, (12/1).

Menurut Mentan ke sembilan wilayah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Balai Embrio Ternak baru tersebut, antara lain di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dengan penambahan jumlah Balai Embrio Ternak tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelahiran sapi kembar hingga 500 ribu ekor.

Sedangkan melalui program inseminasi buatan (IB), Mentan menyatakan dari 6 juta populasi sapi indukan saat sekarang diharapkan mampu mencapai 2 juta ekor yang menerima IB. Dari 6 juta ekor induk tersebut nantinya ditargetkan mampu meningkatkan populasi ternak 3 juta ekor terdiri 1,5 juta ekor dari kelahiran alamiah dan 1,5 juta ekor melalui IB.

Kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang, Mentan meminta untuk bisa meningkatkan produksi embrio menjadi 1.000 bahkan menjadi 500.000 per tahun, karena dirinya sangat ingin untuk dapat meningkatkan produksi embrio, karena tidak ada pilihan lain selain

meningkatkan produksi embrio kebutuhan sapi di Indonesia tercukupi, sehingga tidak tergantung pada impor. “Saya minta 500.000 embrio per tahun sesuai kebutuhan, dengan anggaran kita yang ada, kita bisa perluas lahan dan perbanyak sapi indukan, kalau kita mampu maka tidak perlu impor, kalau ada waktu saya akan pantau pencapaian target produksi 500.000 embrio ini,” kata Mentan.

Menanggapi permintaan embrio tersebut, Kepala BET Cipelang Tri Harsi, menyatakan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat siap mewujudkan keinginan Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi embrio guna mendukung ketersediaan bibit sapi unggul di Indonesia. Meningkatkan produksi dapat saja dilakukan, tetapi butuh persiapan, selain lahan, indukan, juga sumber daya manusianya. “Kebutuhan lahan idealnya untuk memproduksi masa bibit embrio besar-besaran dengan 1.000 ekor sapi donor yakni antar 400 hingga 500 hektar. Luas lahan ini sangat luas untuk penghijauan dan pemeliharaan sapi-sapi donor dan indukan yang ada di balai embrio. 500 hektar itu untuk leluasa bagi pemelihara, penghijauan, laboratorium, kalau kantor tidak perlu, hanya untuk sapi produksi bibit saja,” kata Kepala BET Cipelang.

Kepala BET Cipelang menuturkan saat sekarang Balai Embrio Ternak Cipelang, hanya memiliki lahan seluas 90 hektar, dengan jumlah sapi indukan sekitar 600 ekor. Lahan tersebut sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Walaupun demikian dalam setahun BET Cipelang mampu menghasilkan 600 hingga 700 embrio melalui dua metode yakni invitro dan invivo. Selain itu, teknologi yang digunakan juga mampu menghasilkan embrio kembar. Satu sapi dapat memproduksi embrio hingga 20 embrio per tahun. Total ada sekitar 650 sapi indukan dan donor di BET-Cipelang. Pada tahun 2014, BET menghasilkan 750 embrio yang disalurkan ke seluruh Indonesia dan tahun 2015 target produksi 850 embrio. “Metode yang digunakan dalam memproduksi embrio melalui dua cara yakni invivo adalah produksi embrio di dalam tubuh sapi dan invitro adalah produksi embrio di luar tubuh sapi dengan menggunakan teknologi laboratorium

terkini. Produksi embrio menggunakan sapi-sapi donor terbaik di BET Cipelang dan di luar BET Cipelang. Dalam satu tahun Balai Embrio Ternak Cipelang mampu menghasilkan 750 embrio atau bibit sapi baru yang berkualitas dan di tahun 2015 ini kami menargetkan untuk memproduksi 850 embrio” tutur Kepala BET Cipelang.

Kepala BET Cipelang menyatakan sejak berdiri pada 1991 hingga 2014 telah didistribusikan bibit pejantan unggul sebanyak 183 ekor, embrio 9.132, bibit betina 373 ekor dan pada 2014 BET Cipelang mampu memproduksi sebanyak 716 embrio dan 70 ekor bibit ternak unggul yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Sapi-sapi pejantan unggul yang dihasilkan BET Cipelang telah didistribusikan ke Balai Inseminasi Buatan (BIB) nasional maupun BIB daerah diantaranya BIB Singosari, BIB Lembang, BIBD Sumatera Utara, BIBD Yogyakarta, BIBD Lampung dan lain-lain. “Dalam upaya mendukung program GBIB (Gerakan serentak Birahi dan Inseminasi Buatan) tahun 2015 untuk swasembada daging nasional BET Cipelang mendapatkan tugas mensukseskan pelaksanaan gerakan tersebut sebanyak 26.000 ekor dengan lokasi di Provinsi Riau 10.000 ekor, Sulawesi Tenggara 10.000 ekor, Sulawesi Barat 5.000 ekor dan Banten 1.000 ekor” kata Kepala BET Cipelang.

Lebih lanjut Kepala BET Cipelang menerangkan bahwa embrio yang diperuntukkan bagi program

swasembada daging, memang perlu menggunakan metode invitro atau laboratorium karena yang paling memungkinkan adalah dengan cara metode tersebut. Selain itu pengembangan instalasi embrio ternak di sembilan wilayah untuk meningkatkan produksi juga memerlukan perhitungan selain anggaran juga ketersediaan sumber daya manusia, kriteria produktivitasnya seperti apa dan kemana saja akan dipasarkan. “Ada banyak tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan produksi embrio sapi bibit unggul, terutama dari metode invivo dinilai agak sulit menghasilkan embrio, karena satu donor hanya bisa empat kali produksi sapi dalam setahun. Harga sapi donor juga cukup mahal. Untuk satu ekor sapi betina dijual seharga Rp 60 juta dan sapi jantan seharga Rp100 juta. Total biaya Rp 4,5 miliar itu baru hitungan kasar untuk bibit, belum pembangunan instalansi dan sumber daya manusianya. Misalnya alat laboratorium cukup Rp500 juta untuk mikroskop dan inkubator serta peralatan lainnya,” terang Kepala BET Cipelang.

Kepala BET Cipelang juga mengakui sejumlah kendala untuk memenuhi target kelahiran sapi kembar yakni keterbatasan ketersediaan embrio yang dimiliki. Kemampuan embrio untuk program ‘twin’ hanya seribu, embrio harus ditingkatkan ketersediaannya, sedangkan untuk meningkatkan ketersediaan embrio bagi program kelahiran sapi kembar, harus memanfaatkan ovarium sapi betina produktif yang dipotong di rumah potong hewan, dan hal itu yang tidak mudah.

## Faktor Penyebab Produksi Padi Indonesia Belum Optimal

*“Banyaknya saluran irigasi yang rusak serta sering terjadinya kelangkaan pupuk dan benih, ditambah dalam 10 tahun terakhir jumlah petani di Indonesia berkurang sekitar 500 ribu rumah tangga tani per tahun karena pindah menekuni pekerjaan lain merupakan penyebab belum optimalnya produksi padi di Indonesia”*

Kementerian Pertanian memperkirakan tahun 2015, Indonesia tidak akan mengalami kekurangan beras. Walaupun jumlah beras yang dikonsumsi oleh 67 juta rumah tangga berkisar 2,6 juta ton per bulan tetapi persediaan beras cukup dimana saat sekarang stoknya mencapai 10 juta ton per bulan. Angka kecukupan tersebut juga dihitung dari prediksi panen raya yang berlangsung bulan Januari hingga Februari mendatang. “Untuk sekarang ini persediaan beras di Indonesia masih mencapai 10 juta ton per bulan, sedangkan beras yang dikonsumsi oleh 67 juta rumah tangga warga



Indonesia hanya berkisar 2,6 juta ton per bulan sehingga saya perkirakan persediaan beras di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Sleman-Jawa Tengah (15/1)

Menurut Mentan meskipun saat sekarang harga beras sedang naik namun dirinya memastikan tingkat harga beras nantinya akan segera turun karena pada bulan Januari hingga Februari mendatang beberapa wilayah di Jawa Tengah akan panen raya padi yang hasilnya mencapai sekitar 50 juta ton beras. “Pada bulan Januari hingga Februari 2015 mendatang, untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Tengah produksi padi diperkirakan sekitar 50 juta ton. Saya optimistis harga beras



## Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian BIRO UMUM DAN HUMAS

sebentar lagi turun karena beberapa daerah akan memasuki musim panen “ ujar Mentan.

Mentan menerangkan agar harga beras stabil maka produksi padi di Indonesia harus optimal dan ditingkatkan. Oleh karena itu Pemerintah sedang berupaya keras dapat meningkatkan produksi beras hingga 20 persen sehingga ke depan Indonesia bisa mengekspor beras ke berbagai negara lain dan hal itu diyakini akan segera terwujud. “Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan produksi beras sebesar 20 persen. Jika terealisasi, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengekspor beras ke berbagai negara lain. Hasil padi harus optimal ditingkatkan agar harga beras stabil. Belum optimalnya produksi padi disebabkan masih banyak saluran air yang rusak dan kelangkaan pupuk serta benih” terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya produksi padi di Indonesia di antaranya banyak saluran irigasi yang rusak serta sering terjadinya kelangkaan pupuk dan benih. Selain itu belum optimalnya produksi padi di Indonesia juga karena dalam 10 tahun terakhir jumlah petani di Indonesia berkurang sekitar 500 ribu rumah tangga tani per tahun karena pindah menekuni pekerjaan lain. “Masih banyak saluran air yang rusak dan tidak berfungsi normal serta berkurangnya jumlah petani yang mencapai 500 ribu rumah tangga tani per tahun menjadi penyebab belum optimalnya produksi padi di Indonesia. Oleh karena itu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini Kementan akan fokus melakukan perbaikan saluran irigasi yang rusak serta mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk maupun benih padi berkualitas” jelas Mentan .

Saat meninjau sejumlah saluran irigasi di wilayah desa Summersari kecamatan Moyudan Sleman dan mengetahui ada saluran irigasi yang tanggulnya belum dibangun permanen, Mentan berjanji akan segera membangun tanggul irigasi tersebut. Sedangkan untuk menangani masalah berkurangnya petani, dirinya akan mengganti tenaga penggarap tersebut dengan pemberian alat-alat mesin pertanian yang akan dibantu kepada petani. “Saya lihat di sini masih ada saluran irigasi yang tanggulnya belum dibangun permanen. Nanti akan kami upayakan untuk membangunnya. Melalui bantuan Kementan dalam mendukung pelaksanaannya akan segera direalisasikan Saya targetkan peningkatannya menjadi 40 %. Dengan pemberian bantuan aneka sarana pertanian dan disertai perbaikan saluran air serta

penyaluran bibit maupun pupuk yang tepat waktu. diharapkan produksi padi di Indonesia bisa meningkat 20 persen” ujar Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan, dan tidak lagi impor beras, pihaknya siap meningkatkan produksi padi sebanyak 20 persen dari produksi padi di Sleman yang sekarang mencapai 6,1 ton per hektar dengan cara mengatur pola tanam dan pemberantasan hama akan lebih diefektifkan. “Pemerintah Kabupaten Sleman akan meningkatkan produksi beras dengan cara mengatur pola tanam, dan lebih mengefektifkan pemberantasan hama. Semua langkah dan upaya meningkatkan produksi padi akan terus dilakukan, sehingga target peningkatan produksi beras 20 persen dapat diwujudkan,” kata Bupati Sleman.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Widi Sutikno juga mengatakan produksi beras di kabupaten ini pada 2014 masih tetap surplus, meskipun banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian. dari luas lahan pertanian 30 ribu hektare, produksi padi pada 2014 cenderung meningkat 299.587 ton gabah kering giling. Jika dikonversi ke beras ada 194.708 ton. Dengan tingkat konsumsi masyarakat berkisar 76.440 ton, maka Kabupaten Sleman mengalami surplus beras 118.278 ton beras. “Tidak dipungkiri memang dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian di Sleman, namun pada 2014 produksi beras masih surplus seperti tahun sebelumnya. Angka ini naik sebanyak 5.000 ton dibanding produksi beras pada 2013. Kecenderungan surplus tersebut juga terjadi pada Hasil pertanian jagung, dimana dengan luas areal pertanian jagung mencapai 3.527 hektare hasil per hektare mencapai 64,2 ton. Dengan demikian surplus jagung di Sleman sebesar 10.345 ton. Pada 2015 ini kami menargetkan hasil panen padi 1,1 ton per hektare dan 0,75 hingga satu ton untuk produksi jagung,” kata Kadinas Pertanian Sleman.

Kadinas Pertanian Sleman menambahkan meski dua komoditas pertanian tersebut mengalami kecenderungan surplus, namun tidak dengan dengan hasil produksi kedelai yang sering mengalami minus. Produksi kedelai pada area seluas sekitar 100 hingga 200 hektare, terutama di wilayah Prambanan selama ini masih sering minus karena tanaman kedelai merupakan tanaman untuk wilayah subtropis.





Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian  
BIRO UMUM DAN HUMAS  
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan  
Telp./Fax. (021) 780 4457